

SABTU WAGE, 25 APRIL 2015
(6 REJEB 1948)

HARI INI SEMINAR PRA-MUKTAMAR Muhammadiyah Harus Mampu Siapkan Kader

BANTUL (KR) - Muhammadiyah diharapkan mampu mempersiapkan kader terbaiknya untuk disumbangkan kepada negara, ketika negara ini menghendaki. Negara sebut Dr Yamin, sebenarnya membutuhkan Muhammadiyah dalam ranah politik yang belakangan carut marut dengan persoalan korupsi, kecurangan dan minus etika.

Panitia pelaksana seminar 'Muhammadiyah dan Negara: Arah Pemikiran dan Gerakan Abad Kedua' Dr M Yamin dan lainnya mengemukakan hal tersebut di UMY, Jumat (24/4). Seminar pra-muktamar diselenggarakan, Sabtu (25/4) ini di Mini Theater Gedung Pascasarjana. *Keynote speech* akan disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin. Sejumlah narasumber dari pelbagai perguruan tinggi dijadwalkan menjadi pembicara, seperti Prof Azyumardi Azra, Prof Bambang Cipto, Prof Bachtiar Effendi, Dr Haedar Nashir dan lainnya.

"Untuk mempersiapkan kader tersebut perlu sebuah *ijtihad* yang konkret dalam kaitannya antara Muhammadiyah dan Negara pada abad kedua ini," lanjutnya.

Muhammadiyah yang pernah menjadi anggota istimewa Masyumi sebenarnya memiliki basis historis ketika Muhammadiyah harus berkontribusi nyata dalam hal politik, yakni politik ber peradaban serta politik yang menjunjung etika.

Dicontohkan, sebuah kemajuan besar muncul kala Amien Rais *berijtihad* membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) sekian tahun lalu. Meski harus diakui PAN dan Muhammadiyah kemudian tampak berjalan sendiri-sendiri, sebab dialog tidak selalu berjalan dengan mulus dan dialektis. "Kajian mendalam (*ijtihad* politik) kekinian bukan menjadikan Muhammadiyah seba-

gai partai politik, namun *repositioning* gerakan politik Muhammadiyah di Indonesia," tambahnya.

Sehingga Muhammadiyah dapat benar-benar berkontribusi secara nasional maupun internasional menghadapi berbagai masalah kemunkaran sosial. Seperti korupsi, kerusakan lingkungan, pembalakan liar, makelar kasus, pencurian urang rakyat dan penggelapan pajak serta lainnya.

Muhammadiyah, sudah selayaknya kuat untuk menopang sistem kenegaraan yang bermartabat dan beretika. Tetapi ormas Islam yang nyaris tiada tandingan dalam hal amal usaha, agaknya masih kurang dalam praktik politik. "Sehingga Muhammadiyah tampak galau dan gamang. Terdapat *gap* antara Muhammadiyah dengan negara. Padahal secara riil Muhammadiyah adalah *the biggest Islamic Organization* yang telah diakui oleh dunia maupun nasional," pungkas Yamin. (Fsy)-m